

# EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Novrianto Palebangan  
NPP. 30.1523

Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat  
Program Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email : novripalebangan@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Flood Disaster Management is a step that can be taken to prevent and reduce flood disasters in Sorong City. To find out the effectiveness and supporting and inhibiting factors of the Sorong City Regional Disaster Management Agency in flood disaster management in Sorong City. From the events of the flood disaster that occurred in the City of Sorong. Based on the description above, the authors are interested in conducting research with the title "Effectiveness Of The Flood Disaster Management Program By Regional Disaster Management Agency In Sorong City, West Papua Province". **Method:** The research method used in this study is the qualitative research method used in the study. Sugiyono (2019:2) The author uses 3 (three) different data collection methods to obtain reliable data by observation, interviews, documentation. **Conclusion:** The results of this study concluded that the Sorong City Regional Disaster Management Agency was less effective in dealing with floods, the problem that hindered the BPBD in carrying out flood disaster management was the lack of staff at the BPBD to deal with floods and the lack of good human resources, facilities and infrastructure and awareness, so that things this needs to be addressed.

**Keywords:** Effectiveness, Flood Disaster Management Program

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penanggulangan Bencana Banjir merupakan langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah dan mengurangi bencana banjir di Kota Sorong. Untuk mengetahui efektivitas dan factor-faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Sorong. Dari peristiwa-peristiwa bencana banjir yang terjadi di Daerah Kota Sorong. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Efektivitas Program Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sorong Provinsi Papua Barat". **Metode:** Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu

metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian. Sugiyono (2019:2) Penulis menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dengan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong kurang efektif dalam penanggulangan banjir, masalah yang menghambat BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir adalah kurangnya staf di BPBD untuk menangani banjir dan kurang baik dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kesadaran, sehingga hal ini perlu disikapi.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Program Penanggulangan Bencana Banjir

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Karena letaknya yang berada di Cincin Api Pasifik Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam. Tsunami, bencana global, dan letusan gunung berapi semuanya pernah terjadi di Indonesia secara historis. Di sisi lain, belakangan ini Indonesia mengalami curah hujan yang sangat deras. Lebih spesifiknya, di wilayah Kota Sorong yang hujan telah mengairi berbagai tempat dan menimbulkan banjir kecil atau banjir bandang, bencana alam tidak dapat dihindari mengingat penyebab terjadinya bencana tersebut.

Prosedur Prabencana Penanggulangan Bencana Banjir merupakan salah satu prosedur prabencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong yang merupakan salah satu badan pemerintah wajib dalam penanggulangan bencana. Wilayah Kota Sorong memiliki lingkungan hutan dengan curah hujan bulanan yang khas. Meskipun Sorong merupakan kota dataran tinggi, banjir ini hanya berdampak pada sebagian kota tersebut karena pembuangan yang disengaja telah menyebabkan daerah aliran sungai tersumbat. Hal ini meningkatkan risiko banjir di Kota Sorong karena naiknya permukaan air laut dan hujan lebat. Efek lainnya adalah pada ekosistem, yang bermanifestasi sebagai penurunan dataran banjir di sepanjang pantai. Gafur (2008) menunjukkan bahwa banjir yang diantisipasi di Sorong terutama disebabkan oleh tumpahan dari daerah aliran sungai, yang semakin meluas karena pertumbuhan permukiman di sekitarnya. Bahkan sistem saluran air dan rembesan kota yang tidak berdaya diperparah oleh kondisi hidrologis yang tidak menguntungkan dan di titik-titik fokus. kota yatim piatu. Pola banjir terbesar akan berada di kisaran ini.

Investigasi yang lebih menyeluruh diyakini akan mengungkap lingkungan mana di Sorong yang rentan terhadap banjir. Oleh karena itu, di Kota Sorong dilakukan tindakan pencegahan di daerah rawan banjir untuk mengantisipasi bahaya banjir yang dapat mempengaruhi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat serta lingkungan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "penanggulangan bencana" adalah semua tindakan yang diambil untuk menyusun rencana pembangunan yang rawan bencana serta untuk pulih dari bencana dan tanggap darurat. Tentang UU No 24 Tahun 2007. Artinya masyarakat dalam penanggulangan bencana di lingkungan masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah ketika terjadi bencana, setiap kelompok masyarakat memiliki kemampuan dan cara untuk menghadapi lingkungan guna mempertahankan kehidupannya. Tujuan penanggulangan bencana adalah melindungi masyarakat dari ancaman bencana, memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghormati budaya lokal, membangun masyarakat dan swasta partisipasi dan kemitraan, mendorong semangat gotong royong, solidaritas, dan kedermawanan timbal balik, serta menumbuhkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga negara dari segala bencana, termasuk bencana, serta meminimalkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dengan semua undang-undang di bawah kendalinya, pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk organisasi penanggulangan bencana yang mencakup semua tindakan untuk mencegah bencana dan mengurangi dampaknya. Sebuah dusun atau kelurahan dianggap tahan bencana jika memiliki kemampuan untuk memahami bahaya lokal, membangun jaringan sumber daya untuk mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana.

Definisi Bencana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mempengaruhi tatanan operasi jaringan akibat faktor alam maupun ulah manusia. Kota atau sub-daerah yang memiliki kemampuan menghasilkan aset organisasi untuk mengurangi kelemahan organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas dikenal dengan nama desa atau kelurahan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut “Efektivitas Program Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sorong Provinsi Papua Barat”

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan program penanggulangan bencana banjir dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Sorong. Hal ini sejalan dengan data yang ada bahwa beberapa permasalahan yang terjadi BPBD Kota Sorong antara lain BPBD belum cukup memadai dan banyak butuh penambahan dari pemerintah soal mobil operasional dan juga alat evakuasi para pengungsi, jumlah personil menjadi aspek yang vital karena akan berpengaruh pada kualitas kinerja lembaga dan juga menjadi sebuah bagian pelaksana setiap kegiatan lapangan, BPBD belum bisa melakukan sosialisasi langsung karena anggaran yang dialokasikan untuk BPBD terbatas.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Syaiful Maliki Arief (2019) yang berjudul Tingkat Kerentanan Banjir Kota Sorong Papua Barat. Hasil penelitiannya bahwa tingkat kerentanan dan bahaya banjir di Kota Sorong diklasifikasikan dalam 4 tingkat kerentanan banjir yang meliputi sangat rentan, rentan, kurang rentan, dan tidak rentan. Seluas 4, 21 % wilayah kota Sorong tergolong sangat rentan terhadap banjir, rentan banjir seluas 33,65 % yang kurang rentan sebesar 42.11 % dan daerah tidak rentan sebesar 19,71 %. Wilayah yang harus diwaspadai karena rentan dan sangat rentan banjir adalah seluas 45,48 %.

Penelitian lain oleh Desriyani Dakka (2020) yang berjudul Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir di Kota Sorong Desriyani Dakka 2020. Hasil penelitiannya bahwa banjir di kota Sorong

disebabkan oleh adanya galian C penambangan pasir pada daerah rawan banjir sehingga adanya pengendapan pada sungai maupun kali di sekitarnya dan sampah-sampah plastik yang menimbun saluran pembuangan air yang menyebabkan air meluap ke jalan raya bahkan merendam rumah masyarakat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Efektivitas Program Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sorong Provinsi Papua Barat metode yang digunakan berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Ravianto dkk yaitu menggunakan teori efektivitas (Budiani) dengan dimensi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana efektivitas dalam program penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Sorong.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Selanjutnya penulis mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data yang berkaitan terhadap masalah yang dihadapi dilapangan serta membandingkan pengetahuan teknis terhadap keadaan yang sesungguhnya, guna dapat menarik suatu kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Sorong, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sorong, dan lima orang masyarakat korban banjir di kecamatan Sorong Utara.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Efektivitas Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sorong Provinsi Papua Barat**

#### **3.1.1 Input**

Komponen penting dari operasi program adalah input. Hasil program akan sangat dipengaruhi oleh input. Tujuan program kemungkinan besar akan tercapai jika input sesuai dengan yang dibutuhkan.

##### **a. Sarana Prasarana**

Dari sarana prasarana yang ada di kantor BPBD belum cukup memadai dan banyak butuh penambahan dari pemerintah soal mobil operasional dan juga alat evakuasi para pengungsi, maka dari itu BPBD sedang mengusulkan penambahan unit operasional yang di butuh kan oleh BPBD serta relokasi kantor agar BPBD mempunyai kantor OPD sendiri dan tidak bersama OPD lainnya.

##### **b. Kualitas SDM**

Ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi saat memilih petugas lapangan. Kriteria yang di tentukan agar SDM berkualitas pertama yaitu mengenal tentang penanggulangan bencana, yang kedua dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Selain itu,

memiliki pengetahuan yang lebih karena penanggulangan bencana tidak hanya berbicara tentang satu bencana tapi banyak bencana yang harus diantisipasi dalam keadaan apapun sehingga suatu bencana dapat diatasi lebih cepat dan dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan material. BPBD Kota Sorong hanya memiliki beberapa karyawan lapangan dan 2 staf dan 4 perbantuan dari PMI dan kebanyakan dari karyawan BPBD adalah perempuan dan juga hal ini sangat perlu menjadi perhatian sehingga bisa menambahkan karyawan laki-laki sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi dan juga tahap evakuasi bisa diatasi oleh karyawan lapangan laki-laki sehingga dapat optimal dalam penanganannya, BPBD juga akan membentuk tim TRC (Tim Reaksi Cepat) di tahun ini sehingga dapat membantu kinerja BPBD dalam penanganan bencana di Kota Sorong sehingga bencana dapat diatasi dengan cepat oleh BPBD.

### **3.1.2 Output**

Keluaran program adalah hasil dari eksekusinya. Program yang dilaksanakan bisa efektif atau tidak efektif berdasarkan hasil tersebut; apabila hasilnya sesuai dengan sasaran atau tujuan, maka program dikatakan efektif; jika hasilnya kurang dari tujuan, program dikatakan tidak efektif.

#### **a. Pemahaman Terhadap Program**

Mengingat bencana sering terjadi pada musim hujan dan angin serta sering menjadi penghambat aktivitas, BPBD Kota Sorong harus memberikan sosialisasi tentang penanggulangan bencana agar masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan agar bencana seperti banjir dapat diatasi. cepat teratasi dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Pencegahan merupakan salah satu langkah prioritas BPBD Kota Sorong dalam mengatasi bencana yang akan terjadi di Kota Sorong.

Masyarakat belum memiliki akses yang mudah terhadap informasi terkait pelaksanaan program penanggulangan bencana. Hal ini juga karena minimnya biaya operasional sehingga sosialisasi BPBD ke radio dan surat kabar sampai saat ini masih terbatas. Sosialisasi penanggulangan bencana dalam rangka mengembangkan kepercayaan diri melibatkan lebih dari sekedar melakukannya; itu juga melibatkan seberapa sering itu disampaikan. Mereka yang awalnya apatis tentang sesuatu yang akhirnya mereka pahami akan termotivasi oleh hal ini. Perwujudan informasi yang mungkin secara rutin dikomunikasikan kepada publik tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga, melainkan membutuhkan keterlibatan kelompok lintas sektor dan tokoh masyarakat, yang merupakan aspek alami dari konteks masyarakat.

#### **b. Sasaran Program**

Dalam program penanggulangan bencana banjir di Kota Sorong, BPBD memiliki sasaran pelaksanaan program yang akan dijalankan BPBD dengan berbagai macam tantangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam titik lokasi tertentu, sasaran dari program ini adalah masyarakat yang terdampak oleh bencana banjir yang sering terjadi jika musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, maka dari BPBD membuat masyarakat tersebut menjadi sasaran program dan akan terus berkembang.

Untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi bencana, sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan siswa terhadap bencana. Untuk itu, penanggulangan bencana sebagai kategori kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, lebih tanggap terhadap bencana, dan mampu menghadapi bencana yang akan datang dapat menjadi perhatian semua masyarakat maupun pemerintah agar dapat

meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kota Sorong. Edukasi kebencanaan seperti SOP kebencanaan juga disampaikan.

### **3.1.3 Outcome**

Outcome adalah efek yang memanifestasikan dirinya dalam implementasi program. Jika program tersebut memberikan pengaruh yang positif maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun jika program tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan maka program tersebut tetap tidak efektif.

#### **a. Berkurangnya risiko bencana banjir**

BPBD Kota Sorong dalam mengatasi sebuah permasalahan tentang penanggulangan selalu di hadapkan dengan banyaknya pertanyaan yaitu kapan bencana tersebut dapat diatasi dan kerusakan dari bencana tersebut dapat diantisipasi. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah harus terlibat dalam pengurangan risiko bencana, sehingga tujuan BPBD untuk mengurangi risiko banjir di kota Sorong dapat terwujud untuk menciptakan rasa nyaman di lingkungan.

#### **b. Perkembangan Program**

Dalam perkembangannya program dari BPBD yang menyangkut program penanggulangan bencana dalam waktu ke waktu mulai menunjukkan perkembangan dari pantauan saat ini, BPBD mulai menyusun program agar bencana banjir di Kota Sorong dapat segera teratasi dan bisa mengurangi dampak dari bencana itu sendiri sehingga masyarakat tidak khawatir lagi akan dampak dari bencana banjir yang akan terjadi jika musim hujan tiba.

Dengan selesainya struktur BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong sudah memperkuat diri sebagai lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Namun, kebutuhan sumber daya (dana, sarana, prasarana, personel) tidak tercakup baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi BPBD secara optimal, Kota Sorong harus memenuhi kebutuhan sumber daya (dana, sarana, prasarana, sumber daya manusia) baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## **3.2 Hambatan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sorong Provinsi Papua Barat**

Hambatan adalah halangan atau kendala yang timbul pada saat melakukan suatu kegiatan. Hal ini merupakan aspek yang dihindari oleh organisasi agar setiap rantai layanan, khususnya pengelolaan klaim, dapat dilakukan dengan lancar dan teratur. Namun hambatan juga dapat menjadi keuntungan bagi suatu organisasi, dalam artian hambatan dapat diprediksi dengan berbagai simulasi untuk menciptakan pendekatan berwawasan ke depan. Potensi hambatan tersebut dapat diatasi melalui langkah prediksi dan evaluasi.

#### **a. Kurangnya personil atau pegawai BPBD**

Sebagai lembaga yang memiliki peran untuk melakukan sosialisasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat, jumlah personil menjadi aspek yang vital karena akan berpengaruh pada kualitas kinerja lembaga dan juga menjadi sebuah bagian pelaksana setiap kegiatan lapangan. Idealnya, BPBD mempunyai kepala bagian dan staf yang memiliki tanggung jawab untuk memantau dan melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana.

#### **b. Sosialisasi yang terhambat akibat anggaran**

Sosialisasi BPBD memerlukan dana dari pemerintah daerah dan juga kesiapan dari BPBD sehingga sosialisasi BPBD dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan juga dapat diketahui oleh masyarakat serta dapat membuka ide masyarakat tentang penanggulangan bencana yang ada di Kota Sorong.

c. Sarana untuk menunjang penanggulangan bencana belum difasilitasi secara maksimal

BPBD dalam hal sarana untuk menunjang penanggulangan bencana yang saya lihat belum cukup memadai dalam menghadapi bencana yang akan terjadi kedepannya, BPBD harus membuat program agar fasilitas penunjang penanggulangan bencana bisa dipenuhi oleh pemerintah agar BPBD memiliki fasilitas yang menunjang penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Sorong sehingga bencana tersebut dapat di hindari dan dicegah dari korban dan kerusakan material pada saat terjadinya bencana di Kota Sorong.

Analisis hambatan ini menitikberatkan pada ketersediaan modal transportasi sebagai sarana penyeberangan darat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Penulis juga mencermati dukungan kendaraan khusus dari BPBD Kota Sorong untuk memudahkan pergerakan tim BPBD. keterbatasan fasilitas dari program penanggulangan bencana BPBD menjadi kendala bagi BPBD dalam mempermudah transportasi ke lokasi bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana, BPBD tidak didukung oleh kendaraan operasi khusus, sehingga terkadang BPBD harus menggunakan kendaraan pribadi dan dukungan operasional dari DPO lain. BPBD perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Sorong agar dapat menyediakan kendaraan operasional yang mampu mendukung operasional BPBD agar bencana di Kota Sorong dapat ditangani dengan cepat, meminimalisir korban luka, kematian dan kerusakan harta benda yang lebih besar.

### **3.3 Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sorong Provinsi Papua Barat**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong bertujuan untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Kota Sorong dan BPBD, membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan bagi masyarakat yang sering terkena dampak banjir di daerah rawan banjir dan optimal untuk penanggulangan banjir. umum terjadi pada musim hujan, BPBD juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak banjir guna meminimalkan kerusakan dan kerugian harta benda akibat banjir. Sehubungan dengan itu penulis melakukan wawancara dengan bapak Julius selaku Masyarakat Korban Banjir Di Kecamatan Sorong Utara bahwa, “upaya BPBD dalam penanggulangan bencana yang berada di daerah Kota Sorong sejauh yang saya lihat belum maksimal dalam penanganan saat bencana terjadi dan hal tersebut membuat masyarakat khawatir bencana yang terus-menerus terjadi dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan material di daerah Kota Sorong khususnya wilayah yang terdampak bencana lebih sering dalam tiap tahunnya, BPBD perlu inovasi dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kota Sorong sehingga bencana yang terjadi dapat di atasi serta bisa berkurang tiap tahunnya dan bisa membuat masyarakat merasa tenang jika adanya potensi bencana di wilayah tersebut”.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mewawancarai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ludya Wattimena, SKM, bertempat di kantor BPBD Kota Sorong bahwa “BPBD dalam program penanggulangan banjir yang berlangsung di kota Sorong diharapkan dapat mengurangi terjadinya banjir yang sering terjadi pada musim hujan dengan intensitas tinggi, sehingga membuat cekungan sungai-sungai yang ada kurang efisien jika terjadi banjir. Upaya lainnya adalah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung kerja BPBD dalam melaksanakan program pencegahan”.

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa upaya BPBD dalam melaksanakan program tersebut belum efektif dalam merespons bencana alam dan banjir di kota Sorong.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong kurang efektif dalam penanggulangan banjir, masih perlu adanya perbaikan dalam penanggulangan banjir di Kota Sorong. Masalah yang menghambat BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir adalah kurangnya staf di BPBD untuk menangani banjir. Selain itu, kegiatan sosialisasi belum terlaksana dengan baik dan struktur pendukung pencegahan belum terfasilitasi secara optimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mengatur personel yang merupakan penjaga yang bekerja di kantor atau harus pergi ke tempat kejadian ketika banjir terjadi sehingga dapat ditangani dengan cepat. Upaya BPBD dalam tanggap bencana malah kurang efektif dan kurang baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kesadaran, sehingga hal ini perlu disikapi. Pemkot juga harus menyediakan dana bagi BPBD untuk melengkapi unsur-unsur yang hilang dalam pelaksanaan penanggulangan banjir.

#### **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Andris F M (2020) HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PRAKTEK PETUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERHADAP OPTIMALISASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR (Doctoral dissertation Universitas Hasanuddin). (nd)
- Arief, S., & Sibunan, R. (2019). Tingkat Kerentanan Banjir Kota Sorong Papua Barat (nd).
- Daft, L. Richard. 2010. Summary Theory and Design. Ebook (n.d.).
- Fatmasani, F. Muhammadiyah, M., & Parawangi, A. (2020). Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Program Pengadaan Ambulance di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(1), 30-42. (n.d.).
- Gibson JL JM Ivancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:Erlangga, 2001), hal 120. (n.d.).
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1985. Organisasi, Jilid I. Jakarta : Erlangga (n.d.).



- Gunawan, G., Sahidu, H., Harjono, A., & Suranti, N. M. Y. (2017). The effect of project based learning with virtual media assistance on student's creativity in physics. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 36(2). 167-179. (n.d.).
- INDONESIA, P. R. (24). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (n.d.).
- Muhdar, A., & Sofyan, A. (2021). KINERJA BADAN DAERAH BENCANA DALAM PENANGGULANGAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA SORONG. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 16(2), 18-23. (n.d.). Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Alfabeta. Bandung. (nd). Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Sorong. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (n.d.).
- Ramli, Soehatman, 2010, *Manajemen Bencana*, Cetakan Pertama, PT. Dian Rakyat. (n.d.).
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara, Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan* (n.d.).
- Reswa, M. R. N. (2015). Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). (n.d.).
- Rismawati, R. (n.d.). *Panduan Keselamatan saat Gempa Bumi*. DIVA PRESS. Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (n.d.).
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. (n.d.).
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (n.d.).
- Yulaelawati, E. (2008). *Mencerdasi bencana: banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung api, kebakaran*. Grasindo. (n.d.).

